

PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Ciska Lidia Murniati Silitonga

chiskalidya2@gmail.com

Pembimbing : Dr. Adianto, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Supervision of traditional medicines needs to be carried out by the Regional Government and implemented properly so that it protects the rights of consumers. However, there are still problems in monitoring traditional medicine, so there are still illegal traditional medicines on the market. The purpose of this study was to determine and analyze the Supervision of the Center for Drug and Food Supervision (BPOM) in the Distribution of Traditional Medicines in Pekanbaru City since there are still many drugs and food products made from chemical drugs (BKO), illegal, and expired circulating in the community. The theory used in this study is the supervision theory of Efendi. The research method used is qualitative with qualitative descriptive techniques. The results of this study are that the supervision conducted by the Center for Drug and Food Supervisors in Pekanbaru City has not been optimal, due to the minimal number of supervisory human resources, lack of funds / funds and the socialization of traditional medicines. The advice given is to make recommendations for adding more employees to the central BPOM staffing bureau, the use of social media in socializing traditional medicine.

Keywords: BPOM, Supervision, Distribution, Traditional Medicine.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah otonomi yang berada diwilayah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki luas kurang lebih 632,26 Km², terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan dan jumlah penduduk 782,162 jiwa. Dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga banyaknya peredaran obat tradisional ditengah-tengah masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap obat tradisional juga memicu bermunculannya produsen-produsen obat tradisional yang lain, sehingga masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam obat tradisional dengan berbagai macam pilihan merek dan khasiat. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah tentang diberlakukannya pasar bebas, ketersediaan obat-obat tradisional didalam negeri semakin bertambah dengan adanya obat-obat tradisional asing yang masuk ke Indonesia.

Obat tradisional merupakan ramuan atau bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, dan bahan mineral. Penggunaan obat tradisional di Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa dan banyak dimanfaatkan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu dan penggunaannya terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dikarenakan obat tradisional merupakan sarana paling utama bagi masyarakat tradisional, baik untuk pemeliharaan kesehatan maupun untuk pengobatan gangguan kesehatan.

Sumber: Selebaran BBPOM, 2019.

Pada awalnya ketersediaan obat tradisional dalam bentuk serbuk dan cair, namun saat ini ketersediaan obat tradisional menjadi lebih bervariasi, yaitu dalam bentuk serbuk, cair, kapsul, simplisia dan tablet. Salah satu jenis obat tradisional diantaranya ialah Jamu, yang merupakan obat tradisional berbahan

dasar tumbuhan yang diolah menjadi bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan langsung diminum. Ada juga Obat Herbal Berstandar (OHT) yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam dapat berupa tanaman obat, sari binatang, maupun mineral. Kemudian ada Fitofarmaka sama seperti OHT, produk fitofarmaka terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam berupa tanaman, sari binatang, maupun mineral. Bedanya fitofarmaka adalah jenis obat bahan alam yang efektifitas dan keamanannya sudah dapat disejajarkan dengan obat modern.

Adapun perbandingan antara obat tradisional dengan obat modern ialah, obat tradisional harganya lebih terjangkau, efek samping relatif kecil bahkan ada yang sama sekali tidak menimbulkan efek samping jika digunakan secara tepat, reaksi lambat, efektif untuk penyakit kronis yang sulit diatasi dengan obat kimia, dan dapat digunakan sebagai terapi sampingan atau diet terhadap makanan tertentu. Sedangkan obat modern, harganya relatif mahal karena faktor impor, efek samping pengobatan lebih sering terjadi, reaksinya cepat, relatif kurang efektif untuk penyakit kronis, dapat digunakan sebagai terapi sampingan diet terhadap makanan tertentu dan perlakuan tertentu pada tubuh seperti bedah atau operasi dan manajemen stress.

Sebagai warga Kota Pekanbaru sudah seharusnya masyarakat ikut dalam memajukan daerah dengan mendukung aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap obat dan makanan dalam rangka mencegah atau mengurangi jumlah obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru. Selain itu masyarakat juga harus mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan masyarakat selaku konsumen yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam

pasal 8 ayat 1 butir (a) yang menyebutkan : pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kadaluwarsa pada penandaan/lebel. Dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Obat Tradisional, suplemen makanan, dan pangan obat yang mengandung bahan tertentu wajib mencantumkan informasi kandungan bahan tertentu pada penandaan/lebel. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Non-Departemen yang bertanggungjawab kepada Presiden dan Koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan dilapangan serta uraian – uraian diatas, terdapat beberapa temuan masalah mengenai pengawasan BPOM dalam peredaran obat tradisional.

1. Belum adanya ketetapan waktu pengawasan dilapangan yang dilakukan BPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional melalui sarana distribusi obat tradisional dimana dalam penanganannya sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kota Pekanbaru hanya dilakukan dengan pemeriksaan satu kali saja yang seharusnya dalam aturan jadwal yang dibuat oleh BPOM jadwal pengawasan setiap enam bulan sekali bila perlu adanya himbauan dari masyarakat akan dilakukan setiap bulannya.
2. Belum meratanya sosialisasi terkait obat tradisional apa saja yang dilarang edar, ketetapan edar sehingga beberapa sarana distribusi di Kota Pekanbaru masih terlihat

menjual obat tradisional yang dilarang edar oleh BPOM di Kota Pekanbaru.

3. Belum adanya sanksi hukum yang tegas terkait dalam penanganan Obat Tradisional seperti pemberian sanksi hukum yang tegas, melakukan penyitaan dan penutupan sarana distribusi obat tradisional yang diduga mengandung bahan berbahaya atau yang memiliki izin edar palsu melainkan hanya memberikan himbauan pelarangan saja sehingga terlihat masih banyak peredaran sarana distribusi obat tradisional diperjual belikan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikajikan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun masalah yang perlu dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor – faktor yang menghambat Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBOPM) dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

2. Dari hasil penelitian ini, diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru.
3. Bahan pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik.
4. Informasi bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.

2. KONSEP TEORI

2.1. Teori Manajemen

Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya serta efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Nawawi (2008;41) beliau memilah – memilah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah :

1. Unsur tujuan organisasi, yang bila dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang bila dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja dalam tim (*team work*).
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan

para pekerja dan para manejer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer dipandang sebagai kesatuan dan disebut eksekutif, maka orang lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai *partner*.

Darwis dan kawan-kawan (2009;5) mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Sabarguna (2008;3) menjelaskan bahwa manajemen kinerja sekarang ini menjadi penting karena :

1. Adanya keterkaitan yang luas antara hasil kerja dan proses yang berlangsung.
2. Teknologi informasi menggambarkan keterkaitan lebih jelas dan mudah seperti keterkaitan bonus dengan pencapaian jumlah pelayanan.
3. System informasi dengan bantuan model dapat melakukan proyeksi sebagai prediksi kinerja yang akan datang.
4. Model dapat disiapkan untuk mensimulasikan perubahan yang terjadi dan akibat bagi kinerja yang akan dicapai.

Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fathoni

(2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmawati (2008;14), tujuan dari MSDM adalah untuk meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, ini akan berkaitan dengan kegiatan MSDM.

Sedarmayanti (2000;6) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarik seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi yang telah diterapkan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa MSDM adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dikaitkan dengan aktivitas – aktivitas, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan jasa yang efisien.

Mardalena dan Sarinah (2017:7) Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama

melalui orang-orang dan sumberdaya organisasi lainnya. Terry dalam Manullang (2015:3) manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Menurut Haiman dalam Manullang (2015:3) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. W.J.S Poerwadarmita dalam Badrudin (2015:1) mengatakan bahwa manajemen diartikan sebagai cara mengelolah suatu perusahaan besar, pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang manajer (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan manajemen.

Clayton Reeser dalam Wijaya dan Riva'I (2016:16) berpendapat bahwa manajemen ialah pemanfaat sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan. Dalam pendapat ini didasari betul betapa pentingnya peranan sumber daya manusia (*resources*) yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material. Luther Gulick dalam Sulastri (2014:11) manajemen dimaksud menjadi suatu bidang pengetahuan (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan dengan efektif.

2.2. Konsep Pengawasan

Kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi – fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Dengan demikian pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisiensi pencapaian organisasi.

Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas – tugas lapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2000;96) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai
- c. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan – tindakan korektif

Siagian (2003;112)

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Defenisi diatas jelas terlihat bahwa terdapat hubungan sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Dimana perencanaan tidak dapat berjalan sesuai rencana jika tidak dilaksanakan tindakan pengawasan. Terlihat bahwa fungsi manajemen yakni pengawasan sebagai proses merupakan sistem yang terdiri dari beberapa kegiatan. Tahapan – tahapan kegiatan yang dimaksud dengan mengembangkan teori sistem. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh saling terintegrasi antar semuanya.

2.3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang

bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus). Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan, dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian yang terperinci tentang seseorang atau suatu unit social dalam kurun waktu tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru. Dikarenakan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan BBPOM terkait beredarnya obat tradisional tanpa izin sehingga semakin tahun semakin banyak di dapat obat tradisional yang beredar.

1. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang mengetahui dan memberikan informasi maupun kelengkapan yang dibutuhkan mengenai objek penelitian. Karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Untuk memperoleh informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelaskan objek/situasi sosial yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan yang mengawasi :

1. Bidang Informasi dan Komunikasi (Bapak Adrizal)
 2. Bidang Pemeriksaan (Ibu Syelviyane Pelle)
 3. Bidang Penindakan (Veramika Ginting)
- b. Informan yang diawasi:
1. Pelaku Usaha/Penjual Obat Tradisional di Kota Pekanbaru.
 - Bapak (Berinisial A)
 - Ibu (Berinisial S)
 - Ibu (Berinisial A)
 - Bapak (Berinisial T)

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu:

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobjektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan. Baik melalui observasi maupun wawancara.

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pengawasan BBPOM terhadap Peredaran Obat Tradisional tanpa memiliki izin edar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan – keterangan yang diperlukan peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang

diteliti. Adapun data sekunder berupa Undang – Undang, buku – buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber – sumber lain yang dibutuhkan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap focus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fakta – fakta yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden. Wawancara dilakukan kepada Kepala BBPOM Kota Pekanbaru khususnya yang terkait dengan pengawasan Obat Tradisional.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus – menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Milles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Milles dan Huberman hanyalah sebagai dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama ia menulis, suatu tinjauan

ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perencanaan tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan didalam pelaksanaannya. Suatu perencanaan yang dilakukan tanpa disertai pengawasan yang intensif dan menyebabkan tidak terjaminnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi memperbaiki dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga diharapkan suatu hasil yang maksimal. Pengawasan terhadap obat tradisional dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk obat tradisional yang beredar dimasyarakat tidak merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Produk obat

tradisional yang beredar dimasyarakat harus terjamin mulai dari produksi, pendistribusian yang telah memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu agar tersedia obat tradisional yang sesuai dan layak untuk digunakan oleh masyarakat.

1. Penentuan Standar Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum melakukan pengawasan harus ada standar-standar yang ditetapkan, hal ini dilakukan agar mudah menilai kesalahan serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan maupun tugas yang telah ditentukan. Penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengawasan obat tradisional oleh BBPOM di Kota Pekanbaru ditentukan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

1. Pelaksanaan suatu kegiatan memerlukan standar waktu yang dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan, sehingga proses berjalannya suatu kegiatan dapat mencapai target yang diinginkan. Pengawasan harus tepat waktu artinya, sesuai dengan kebutuhan kapan pengawasan harus dilakukan. Setiap kegiatan memerlukan waktu pengawasan yang berbeda. Ketetapan waktu digunakan agar mencegah terjadinya penyimpangan yang lebih fatal dan munculnya anggapan penyimpangan sebagai suatu yang wajar dan sulit untuk diperbaiki. Hal ini juga dilakukan oleh BBPOM dalam melaksanakan pengawasan peredaran obat tradisional di kota pekanbaru.

2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melakukan penetapan standar pelaksanaan kegiatan, maka pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan juga harus dilaksanakan agar

pelaksanaan kegiatan selalu terkontrol sehingga kinerja yang dicapai sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, dan dari pengukuran pelaksanaan kegiatan ini dapat ditentukan metode penilaian kinerja yang sudah dilakukan. Adapun metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru diukur melalui terpenuhinya indikator kinerja yang mendukung pencapaiannya. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang dilakukan oleh BBPOM dalam melakukan metode penilaian kinerjanya, yaitu:

1. Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat
3. Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Kota Pekanbaru

3. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Analisis Penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan kinerja atau kegiatan dengan standar analisis penyimpangan dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai atau mengapa standar tercapai tetapi masih ditemukan obat tradisional ilegal dipasaran dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Tahap kritis dari pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Standar-standar yang ada seperti standar obat tradisional yang beredar serta standar waktu dalam pengawasan peredaran obat tradisional.

4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Dalam proses pengawasan terdapat tindakan koreksi atau perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasti akan ada terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tindakan koreksi diharapkan agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperbaiki. Selain itu tindakan koreksi juga dapat menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sama dalam satu kegiatan. Adapun indikator-indikator dalam mengadakan tindakan koreksi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Pembinaan

Untuk mengurangi peredaran obat tradisional ilegal yang membahayakan bagi penggunaannya di Kota Pekanbaru, maka BBPOM melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dan juga kepada masyarakat yang menggunakan produk obat tradisional. Dengan diadakannya pembinaan diharapkan kepada para pelaku usaha untuk mematuhi semua peraturan mengenai syarat-syarat yang dibolehkan untuk obat tradisional yang akan beredar begitu juga kepada masyarakat agar mereka lebih memperhatikan obat tradisional yang akan dibeli agar terjamin keamanan, mutu saat menggunakannya.

Pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM haruslah dilakukan secara baik dan terus menerus dan menjangkau semua kalangan-kalangan yang menggunakan obat tradisional, agar memunculkan kesadaran kepada pelaku usaha dan juga masyarakat untuk tidak menjual ataupun menggunakan obat tradisional ilegal. Sehingga pelaku usaha tidak lagi menjual obat tradisional ilegal dan masyarakat tidak lagi membeli obat tradisional yang terindikasi ilegal dengan munculnya kesadaran pelaku usaha ini akan mengurangi permasalahan beredarnya obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru.

b. Melakukan Pemberian Sanksi

Dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap pengawasan peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru, selain melakukan pembinaan BBPOM juga memberikan sanksi. Pemberian sanksi dilakukan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperjualbelikan produk-produk obat tradisional yang ilegal yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini dimaksudkan agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tidak terjadi kembali. Di dalam Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencamtuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Lebel. Pasal 9 dijelaskan bahwa:

Pasal 9 menjelaskan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Perintah penarikan dan/atau pemusnahan produk
- c. Pembekuan izin edar/persetujuan pendaftaran, dan
- d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Faktor-Faktor Penghambat Peredaran Obat Tradisional Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dan pelaksanaan pekerjaan yang telah

ditetapkan. Pegawai yang memiliki suatu organisasi akan mempengaruhi pelaksanaan dari suatu pekerjaan. Oleh sebab itu pegawai menjadi faktor yang mendorong atau penghambat terlaksananya pengawasan peredaran obat tradisional ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

b. Biaya/Dana

Berbicara mengenai dana merupakan suatu hal yang sangat penting dari setiap kegiatan. Kegiatan yang dilakukan setiap instansi dan apapun itu selalu berkaitan dengan dana/biaya. Dalam hal ini berbicara mengenai dana pengawasan peredaran obat tradisional ilegal demi menjaga kepentingan konsumen.

c. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru. Pemahaman masyarakat mengenai obat tradisional yang baik digunakan harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam melakukan pengawasan peredaran obat tradisional ilegal yang tidak memiliki persyaratan di Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dalam proses Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Di Kota Pekanbaru agar bisa menjalankan aktivitas pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil mengenai Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Pekanbaru masih belum efektif bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis melihat bagaimana pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru yang dilihat dari: masih adanya ditemukan produk obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru karena belum rutusnya melakukan pengawasan ke sarana-sarana penjualan obat tradisional, serta pengambilan tindakan koreksi yang juga belum memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku usaha obat tradisional.

2) Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan peredaran obat tradisional yaitu kurangnya biaya atau dana yang dibutuhkan saat melakukan pengawasan apalagi berkoordinasi dengan instansi lintas sektor, dan semua biaya ditanggung oleh BBPOM. Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru masih belum efektif yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan obat tradisional atau terhadap obat tradisional yang beredar masih sangat kurang, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan obat tradisional yang boleh digunakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan media social yang ada di internet seperti *Blog, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo, Instragram*, selain dapat menekan biaya anggaran yang haru dikeluarkan dengan memanfaatkan media internet banyak masyarakat yang belum mengetahui obat tradisional ilegal maupun yang legal memperoleh informasi mengenai produk-produk yang layak dikonsumsi agar peredaran dan permintaan obat tradisional yang ilegal dapat ditekan yang secara tidak langsung juga membantu BBPOM dalam melakukan pengawasan.
2. Mengajukan peningkatan anggaran dana dan penambahan jumlah sarana transportasi yang ada kepada BPOM pusat atau mengkaji perencanaan kebutuhan anggaran yang ada saat ini untuk anggaran tahun berikutnya dalam hal pengadaan sarana transportasi karena sarana transportasi merupakan kelengkapan yang sangat vital dalam menunjang kegiatan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. 2001. *Aspek – aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Daryanto. (2013). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darwis, E.Y, dan Bathara, L. 2009. *Dasar – dasar Manajemen, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau*.

Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Efendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Handoko, T Hani. 2003. *Management Edisi 2*. BPFE, Yogyakarta.

Handyaningkrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.

Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

_____. 2006. *Manajemen dasar, Pengertian & Masalah Edisi Ketujuh*. Jakarta, Bumi Aksara.

Maharani, Suriansyah. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Makawimbang. (2012). *Teory dan Pengukuran (Analisis di Bidang Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta

Manullang, M. 2008. *Dasar - Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Mardalena dan Sarinah. (2017). *Pengantar Mnajemen*. Yogyakarta. Deepublish.

Nawawi, H. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ndraha. Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Bumi Aksara.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Dasar – Dasar Manajemen Edisi Kelima*. BPFE. Yogyakarta.

Sedarmayanti. 2000. *Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja (Suatu Tinjauan dari Aspek Ergonomo Atau Kaitan Antara*

Manusia Dengan Lingkungan Kerja, Bandung : CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang. P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

_____, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Raja Grafindo. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sule dan Saefullah. (2018). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Terry, George R. 2014. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.

Winardi, J. 2000. *Azas – Azas Manajemen*. Mandar Maju. Bandung.

Wijaya dan Rifa'i. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.

Yin, R.K. (2013). *Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Perundang – Undangan

1. Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2013, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
3. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kadaluwarsa pada penandaan/lebel.

C. Karya Ilmiah

Dina Amelia 2015, Judul *pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran Distribusi Obat dan illegal (Studi di Apotek Kota Pekanbaru)*

Heriyanto, 2016 judul, *Pengawasan balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kabupaten Pelalawan Dalam Peredaran Obat Tradisional*.

Arif Budiman, 2016 Judul, *pengawasan Balai Besar Obat Dan Makanan Dalam peredaran Obat Tradisional Di Kabupaten IndragiriHulu*.

Ermawati, 2017 Judul, *fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Obat Tradisional*.

Nandy Guvita, 2017 Judul, *kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Obat Tradisional di Kabupaten Kampar*.

D. Dokumen

1. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Kududukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
2. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.

03.1.23.06.10.5166 Tentang
Pencantuman Informasi Asal Bahan
Tertentu, Kandungan, Alkohol, Dan
Batas Kadaluwarsa Pada
Penandaan/Label Obat, Obat
Tradisional, Suplemen Makanan, dan
Pangan.

E. Internet

1. <https://astrot.pom.go.id/astrot/index.php/home/depan/prosedur>. Diakses pada 7 April 2019 pukul 20.15 WIB
2. <http://www.pom.go.id/new/view/direct/background>. Diakses pada 9 April 2019 pukul 10.17 WIB